

BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

BULETIN DWI WULAN BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Edisi III / 2013

Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik
Badan Usaha Jasa Konstruksi

Kunjungan Teknik dalam rangka Persiapan
*Establishment of National Safety Management Center for
Public Facilities di Indonesia*



Design-Build atau EPC? FIDIC MENJAWAB KEBUTUHAN AKAN
KEPASTIAN HARGA KONTRAK DI ERA KETERBUKAAN

ISSN 1907-0136



BULETIN BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

Pembina/Pelindung :

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi .

Dewan Redaksi :

Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi;
Kepala Pusat Pembinaan Usaha & Kelembagaan;
Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi;
Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi;
Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan
Konstruksi.

Pemimpin Umum :

Mahbullah Nurdin

Pemimpin Redaksi :

Hambali

Penyunting / Editor :

Maria Ulfah
Kristinawati Pratiwi Hadi

Redaksi Sekretariat :

Gigih Adikusomo
Budiasih Dyah Saraswati
Koko Gilang Nugroho
Anjar Pramulansih

Administrasi dan Distribusi :

Nanan Abidin
Sugeng Sunyoto
Agus Firngadi
Ahmad Suyaman
Ahmad Iqbal

Desain dan Tata Letak:

Nanang Supriadi
Y. Bisma Wikantyasa

Fotografer :

Sri Bagus Herutomo

Alamat Redaksi :

Gedung Utama Lt. 10
Jl. Pattimura No.20 - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Tlp/Fax. 021-72797848
E-Mail : datinfo2006@yahoo.com

Salam dari redaksi

Indonesia sedang di persimpangan. Ibarat sedang menempuh perjalanan, saat ini Indonesia sedang di ambang persilangan arah. Kita masih berhenti sejenak, sejenak untuk mengamati akan kemana dan apa saja yang harus dipersiapkan, jika kita telah mengambil pilihan arah tersebut.

Pilihan arah tersebut salah satunya adalah persiapan Indonesia menghadapi Asean Economic Community 2015, yang tinggal menghitung waktu yang terbalut dalam bungkusan bulan. Tidak lama lagi, dan yang pasti membutuhkan banyak persiapan yang tidak ringan.

Di dunia konstruksi, Indonesia harus mempersiapkan tenaga kerja yang mampu bersaing tidak hanya kompetensi tapi juga efisien dari sisi harga. Belum lagi badan usaha yang berdaya saing, bukan hanya mampu menang di kandang sendiri. Dan tentunya regulasi yang mampu melindungi anak bangsa di kancah pertarungan lokal. Inilah tugas Pemerintah, yang harus didukung segenap masyarakat konstruksi.

Tapi apapun pilihan arah itu, siap atau tidak siap. Kita harus maju, karena mundur bukanlah pilihan !

Selamat membaca kembali pembaca setia Buletin Badan Pembinaan Konstruksi. Di edisi III tahun 2013 kali ini, pembaca dapat menyimak informasi mengenai FIDIC Conditions of Contract Design-Build-Operate, Laporan Sidang ASEAN Coordinating Committee on Services ke 73 di Brunei Darussalam, Kunjungan Teknik ke Korea Selatan dalam rangka Persiapan Establishment of National Safety Management Center for Public Facilities in Indonesia, Kerjasama Pelatihan antara Kementerian PU dengan Politeknik TEDC Bandung, dan seterusnya.

Tak lupa kami redaksi Buletin Badan Pembinaan Konstruksi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1434 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhaana hu wa Ta'ala. Aamiin.

Daftar Isi

► Design-Build atau EPC? FIDIC Menjawab Kebutuhan akan Kepastian Harga Kontrak di Era Keterbukaan	3
► Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi	7
► Demi Citaku Merantau, Menggapai Asa	10
► Kunjungan Teknik dalam rangka Persiapan Establishment of National Safety Management Center for Public Facilities Di Indonesia	12
► Laporan Sidang Asean Coordinating Committee on Services (CCS) ke-73	15
► Menteri PU Buka Seminar FIDIC	18
► Peran Talent Mapping bagi Jenjang Karir	20
► Renungan Jelang Ramadhan, Memperhatikan Diri Perbuatan yang Terlupakan	21
► Kegiatan Dharma Wanita Badan Pembinaan Konstruksi	23
► Partisipasi Kementerian PU pada Pameran Peralatan Konstruksi INDO ICON dan Indo BIMEX 2013	24
► Profil Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah IV Makassar, Berjuang Meningkatkan SDM Konstruksi di Sulawesi	26

Design-Build atau EPC?

FIDIC MENJAWAB KEBUTUHAN AKAN KEPASTIAN HARGA KONTRAK DI ERA KETERBUKAAN

Oleh: Sarwono Hardjomuljadi

M

emilih bentuk kontrak yang akan dipakai, memerlukan pertimbangan yang teliti, karena pemilihan setiap bentuk akan mempunyai resikonya masing-masing.

Rancang bangun (*design build*) saat ini sedang mulai ramai dibicarakan sebagai pengganti kontrak tradisional, yaitu kontrak yang melibatkan tiga pihak, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa kontraktor, dimana pengguna jasa menunjuk penyedia jasa konsultan sebagai engineer yang mewakili pengguna jasa dalam pengawasan pelaksanaan proyek, dimana pembayaran hasil pekerjaan dilakukan berdasarkan pengukuran hasil fisik di lapangan (*re-measurement*) dengan harga satuan yang tercantum dalam "bill of quantity".

Rancang bangun (*design build*) digunakan dengan beberapa alasan. Di antaranya adalah tidak siapnya desain pada saat akan dilakukan tender, dan adanya harapan bahwa dengan rancang bangun (*design build*), harga kontrak akan menjadi lebih pasti dan resiko di pihak pengguna jasa akan mengecil.

Benarkah demikian? Jawabnya, tidak, karena antara kontrak tradisional dan kontrak rancang bangun hampir tidak ada perbedaan substansial menyangkut hal di atas.



Apakah untuk proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung, pusat listrik tenaga air, rancang bangun lebih cocok dipakai ketimbang kontrak konvensional?

Rancang bangun (*design build*) sangat cocok untuk suatu proyek yang daerahnya terbatas, seperti bangunan superstruktur pembangkit dan pekerjaan mekanikal-elektrikal. Hal ini disebabkan desain dari tiap pabrik akan berbeda, dan bagi pengguna jasa yang penting adalah keluaran (*output*) dari peralatan yang selesai dipasang dan dioperasikan sesuai dengan kriteria yang diinginkan pengguna jasa. Pabrik akan menyesuaikan keluaran (*output*) instalasi mesin (*plant*)

yang disyaratkan/sesuai kebutuhan pengguna jasa. Bentuk luar struktur mesin masing-masing pabrik tentunya akan berbeda. Akan tetapi hal itu tidak menjadi masalah bagi suatu kontrak rancang bangun (*design build*), karena yang disyaratkan bukannya bentuk fisik, melainkan keluaran (*output*) sesuai persyaratan/kebutuhan pengguna jasa.

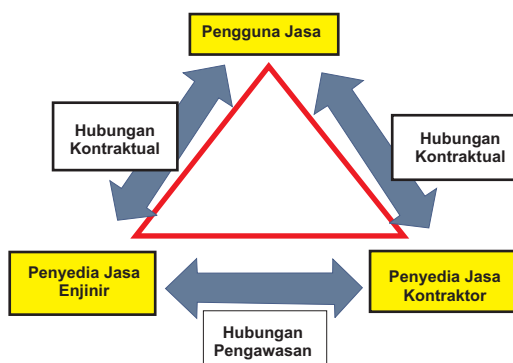
Sebagai contoh untuk infrastruktur jalan dan jembatan, pengguna jasa akan mensyaratkan apa yang diharapkannya pada persyaratan/kebutuhan pengguna jasa secara jelas. Misalnya jalan dengan kemampuan untuk mendukung beban sebesar sekian, dan lebar perkerasan sekian untuk dapat dipergunakan oleh kendaraan dua arah.

Kinerja yang diharapkan adalah sampai pada tahap penyelesaian proyek, dan kemudian diperiksa apakah dapat memenuhi semua persyaratan/kebutuhan pengguna jasa.

Sejarah FIDIC Buku Merah, Buku Kuning dan Buku Perak

Pada tahun 1999 FIDIC menerbitkan "rainbow series" atau "seri pelangi" persyaratan umum kontrak, yang terdiri dari:

- Untuk Konstruksi (*Construction*) dikenal sebagai buku Merah, edisi Bahasa Indonesia "Persyaratan Kontrak untuk Pelaksanaan Konstruksi" 2008 dengan lisensi dari FIDIC oleh Sarwono Hardjomuljadi et.al.
- Untuk Instalasi Mesin dan Rancang-Bangun (*Plant and Design-Build*) dikenal sebagai buku Kuning, edisi Bahasa Indonesia, sedang dalam tahap penyelesaian.

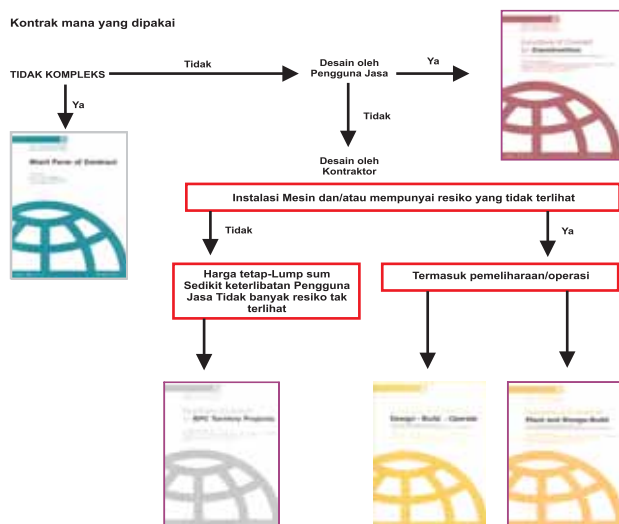


Gambar 1
Hubungan Para Pihak dalam Kontrak Konstruksi dan Rancang Bangun

- c. Untuk *EPC/Proyek Turnkey (EPC/Turnkey Projects)* dikenal sebagai buku Perak, edisi Bahasa Indonesia “Persyaratan Kontrak untuk Proyek *EPC/Turnkey*” 2009 dengan lisensi dari FIDIC oleh Sarwono Hardjomuljadi et.al.
- d. Untuk proyek-proyek kecil dan yang tidak kompleks (*Short Form of Contract*), dikenal sebagai Buku Hijau, edisi Bahasa Indonesia “Kontrak Ringkas” 2009 dengan lisensi dari FIDIC oleh Sarwono Hardjomuljadi et.al.

Semua ini adalah merupakan suatu upaya dari FIDIC untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan untuk suatu dokumen kontrak yang “up to date”.

Seiring dengan berjalannya waktu, tumbuh suatu kebutuhan mengikuti “trend”, yaitu pihak pengguna jasa menginginkan suatu proyek yang telah diselesaikan oleh kontraktor mempunyai kualitas yang baik, dan berumur panjang sehingga tidak memerlukan pembiayaan tambahan lagi untuk perbaikannya.



Gambar 2
Skema pemilihan bentuk kontrak

Buku Merah adalah yang paling lama dikenal, bahkan jika orang mengatakan menggunakan Kontrak FIDIC, maka yang dimaksud adalah Buku Merah ini. Di Indonesia Buku Merah dipakai secara utuh untuk pertama kalinya di Proyek PLTA Cirata pada tahun 1982 di mana Persyaratan Umum Kontrak (*General Conditions of Contract*) dari FIDIC, dipakai secara utuh dengan tambahan pada Persyaratan Khusus (*Particular Condition*). Pada proyek-proyek sebelumnya, bahkan pada proyek yang hanya selisih 3 tahun lebih dulu, yaitu PLTA Saguling, Persyaratan Umum Kontrak (*General Conditions of Contract*) dimodifikasi atau lebih tepatnya dimutilasi. Buku Merah ini dalam perjalanannya berkembang menjadi Buku Jingga (*Pink*) yaitu Buku Merah edisi khusus yang disiapkan bersama dengan Multilateral Development Bank dikenal sebagai MDB Harmonised Edition 2006 yang masuk menjadi bagian dari *Standard Bidding Document* dari *World Bank*, *JICA*, *ADB* dan yang lain.

Buku Kuning dibuat pertama kalinya untuk kebutuhan pembangunan instalasi mesin pembangkit yang pada umumnya pekerjaan elektrikal mekanikal hingga pembangunannya di lapangan. Disini kontraktor melaksanakan mayoritas dari desain sehingga instalasi mesin memenuhi persyaratan kinerja yang diminta oleh Pengguna Jasa. Dalam perkembangannya, Buku Kuning juga dipakai pada pekerjaan selain instalasi mesin, yang selama ini dikenal sebagai “*performance based contract*”.

Buku Perak, memiliki persamaan dengan Buku Kuning yaitu desain dibuat oleh kontraktor dan kemudian pembangunan dilaksanakan juga olehnya. Saat ini Buku Perak telah banyak dipakai pada proyek-proyek jalan tol di Indonesia dan berhasil baik. Dengan menggunakan Buku Perak ini, semua pelaksanaan konstruksi dilaksanakan oleh kontraktor. Perbedaan pokok antara Buku Perak dengan Buku Merah dan Buku Kuning adalah pada kaitannya dengan “*Unforeseeable Physical Conditions*” yang kita kenal selama ini pada Buku Merah dan Buku Kuning, tidak ada lagi pada Buku Perak, diganti dengan “*Unforeseeable Difficulties*”.

Apa perbedaan pokok antara Buku Merah dan Buku Kuning?

Hanya terdapat sedikit perbedaan antara keduanya, karena pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang mendasar terhadap pelaksanaan pekerjaan itu sendiri, yaitu:

- a. Jika dalam Buku Merah, kontraktor melaksanakan semua pekerjaan sesuai desain yang disiapkan oleh Pengguna Jasa (biasanya dibuat oleh konsultan desain, termasuk didalamnya spesifikasi dan gambar), maka dalam Buku Kuning kontraktor menyiapkan desain dan melaksanakan pembangunan sesuai desain yang dibuatnya dengan batasan proposal yang diajukan kepada Pengguna Jasa sesuai dengan persyaratan/kebutuhan Pengguna Jasa (*Employer's Requirements*).
- b. Pada Buku Merah, pembayaran dilakukan berdasarkan sertifikat engineer yang dibuat berdasarkan pengukuran hasil kerja pekerjaan dengan harga satuan yang tercantum dalam daftar harga satuan (BOQ), sedang dalam Buku Kuning pembayaran juga didasari sertifikat engineer, namun dasarnya adalah persentase hasil pekerjaan yang disepakati.

Saat ini di Indonesia mulai digunakan kontrak Rancang Bangun (*Design-Build*) namun tidak sepenuhnya mengikuti standar kontrak FIDIC Buku Kuning, banyak modifikasi dilakukan didalam persyaratan umum kontrak (*conditions of contract*) itu, sehingga pada pelaksanaannya justru menimbulkan lebih banyak masalah ketimbang menyelesaikan masalah di pihak pengguna jasa.

Sebaiknya, standar kontrak FIDIC digunakan secara utuh, sehingga hasilnya akan optimal. Karena pembuatan kontrak FIDIC telah dilakukan sejak 1913 dan mengalami

perubahan dari masa ke masa yang dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman.

Apakah benar pelaksanaan kontrak itu perlu mengikuti perkembangan zaman? Tentu saja. Contohnya, “klaim” yang disampaikan oleh kontraktor pada awalnya adalah perbedaan volume sehingga terbitlah fungsi *quantity surveyor*, kemudian berubah menjadi “klaim” kelambatan pembayaran. Lalu “klaim” akibat “kejadian yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya” yang saat ini masih merupakan favorit rekan kita para “lawyer” untuk mengajukan klaim dari pihak kontraktor. Kemudian “klaim” akibat kelambatan penyerahan lahan kerja kepada kontraktor yang menjadi permasalahan klasik di Indonesia. Di atas semua klaim tersebut, berdasarkan penelitian yang saya lakukan ternyata klaim yang paling efektif dari kontraktor dan sulit dihindari oleh Pengguna Jasa jika tidak diambil langkah-langkah adalah “*in-efisiensi*”, hal ini telah didiskusikan pada Panel of Expert Meeting tentang FIDIC MDB Harmonised Edition pada Januari 2011 dan Juni 2012 keduanya di Brussels, dan disepakati.

Dari bahasan di atas, perubahan penggunaan dari Buku Merah menjadi Buku Kuning biasanya dilakukan dalam hal desain tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Pengguna Jasa (dengan penugasan ke konsultan desain), karena alasan waktu ataupun alasan lain, disertai harapan pengalihan resiko kepada penyedia jasa. Mengingat klausula-klausula pada Buku Kuning hampir sama dengan Buku Merah dan didalamnya terdapat klausula 4.12 *Unforeseeable Physical Condition* maka harapan untuk tidak adanya klaim tambahan biaya dan waktu adalah hampir tidak mungkin, karena pada Buku Merah maupun Buku Kuning perubahan biaya dan penambahan waktu sangatlah dimungkinkan sebagai suatu *conditions of contract* yang adil dan berimbang.

Apa perbedaan pokok Buku Merah dan Buku Kuning dengan Buku Perak?

Terdapat perbedaan yang substansial, seperti dapat dilihat dibawah ini:

Clause 4.12 Unforeseeable Physical Conditions
In this Sub-Clause “physical conditions” means natural physical conditions and man made and other physical obstructions and pollutants, which the Contractor encounters at the Site when executing the Works, including sub-surface and hydrological conditions but excluding climatic conditions.
If the Contractor encounters adverse physical conditions which he considers to have been Unforeseeable, the Contractor shall give notice to the Engineer as soon as practicable.
(FIDIC General Conditions of Contract for Construction, 1st Edition 1999 and MDB Harmonised Edition 2006)

(FIDIC General Conditions of Contract for Plant and Design-Build, 1st Edition 1999)

Sub-Clause 4.12 Unforeseeable Difficulties
Except as otherwise stated in the Contract:
(a) the Contractor shall be deemed to have obtained all necessary information as to risks, contingencies and other circumstances which may influence or affect the Works;
(b) by signing the Contract, the Contractor accepts total responsibility for having foreseen all difficulties and costs of successfully completing the Works, and
(c) the Contract Price shall not be adjusted to take account of any unforeseen difficulties or costs.
(Conditions of Contract for EPC/Turnkey Project: 1999)

Dari klausula di atas, terlihat bahwa dalam penggunaan Buku Perak, kontraktor dianggap sudah mengerti semua keadaan di lapangan dan tidak berhak mengajukan tambahan biaya atau tambahan waktu, jika tidak ada perintah atau perubahan lingkup pekerjaan termasuk di dalamnya perubahan desain yang diperintahkan oleh pengguna jasa.

Pengembangan *Design-Build* menjadi *Design-Build and Operate*.

Adanya “kepedulian” yang tinggi dari institusi pemeriksa, bahkan isu “korupsi” sangat mengemuka di negara berkembang termasuk Indonesia. Sehingga jika suatu hasil pembangunan rusak lebih cepat dari umur rencana, dapat mengarah menjadi isu korupsi. Meskipun sebenarnya belum tentu demikian. Sebagai contoh, suatu jalan yang selesai dibuat kemudian rusak lebih cepat dari umur rencana, berdasarkan riset ternyata bukan karena kualitas yang dibawah standar atau spesifikasi, tetapi perkembangan beban jalan yang terjadi melonjak di luar perkiraan.

Didorong oleh hal di atas, dapat dipahami jika terdapat suatu kebutuhan yang terus berkembang akan suatu dokumen yang menggabungkan kewajiban rancang-bangun (DB) dengan komitmen pengoperasian (O) jangka panjang. Untuk mendapatkan hal ini, dapat dipilih kontrak DBO, yaitu salah satu bentuk kontrak terbaru dari FIDIC dengan perbedaan yang substantif, karena setelah selesainya proyek, pengoperasian tetap menjadi kewajiban kontraktor hingga suatu batas waktu tertentu.

Terdapat alternatif skenario mengenai konsep Rancang-Bangun-Operasi (*Design-Build-Operation*), seperti skenario ‘*greenfield*’ DBO dan skenario ‘*brownfield*’ DBO. Skenario yang berbeda membutuhkan persyaratan kontrak yang berbeda pula. Persyaratan untuk operasi jangka pendek juga tentu saja berbeda dengan persyaratan untuk operasi jangka panjang. Pertimbangan selanjutnya adalah apakah pendekatan terhadap proyek DBO adalah kontrak tunggal jangka panjang atau dua kontrak secara terpisah atau tergabung.

Persyaratan Umum FIDIC untuk Proyek Rancang, Bangun dan Operasi (*FIDIC Conditions of Contract for Design, Build and Operate Projects*).

FIDIC menggunakan skenario ‘*greenfield*’ DBO, dengan masa operasi 20 tahun dan pilihan kontrak tunggal bagi suatu entitas kontrak (yang hampir pasti merupakan suatu konsorsium atau *joint venture*) untuk mengoptimalkan koordinasi antara inovasi, kualitas dan kinerja, ketimbang memberikan kontrak rancang-bangun dan kontrak operasi secara terpisah. Kontraktor tidak memiliki kewajiban, baik untuk mendanai proyek maupun mencapai keberhasilan secara komersial yang setinggi-tingginya.

Jenis proyek yang dapat memperoleh manfaat dari mengadopsi bentuk pengadaan DBO adalah proyek infrastruktur tipikal di mana fasilitas yang dihasilkan akan mendatangkan penghasilan atau pendapatan bagi Pengguna Jasa dan di mana Pengguna Jasa mungkin tidak memiliki sumber daya atau pengalaman untuk mengoperasikan sendiri fasilitas tersebut dan oleh karenanya mempertimbangkan penggunaan penyedia jasa atau operator

Terdapat sejumlah orang dan para pihak yang terlibat dalam suatu proyek DBO sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Kontrak sebagai tambahan dari kontrak konvensional, yaitu:

Pengguna Jasa (lihat Definisi 1.1.32), dan Kontraktor (lihat Definisi 1.1.17).

Masing-masing Pihak memiliki kewajiban, tugas dan hak terhadap yang lainnya di bawah Kontrak, dan setiap kewajiban, tugas dan hak diatur dengan penggunaan kata “harus” atau “boleh” (lihat Sub-Klausula 1.2 [Interpretasi]). Dengan Sub-Klausula 1.8 [Penunjukan], tidak ada satu Pihak pun yang boleh memberikan baik keseluruhan maupun bagian manapun dari Kontrak kepada pihak ketiga tanpa kesepakatan tertulis dari Pihak lainnya, dan Kontrak dibuat dengan asumsi bahwa para Pihak memenuhi tugas dan kewajiban mereka sebagaimana ditetapkan.

Penunjukan berarti pelimpahan hak di bawah suatu kontrak kepada pihak ketiga dan hal ini tidak boleh dikaburkan dengan hubungan lain seperti subkontrak (di mana, dengan maksud untuk melaksanakan suatu kontrak konstruksi, kontraktor menggunakan jasa dari kontraktor lain, yang disebut subkontraktor, yang memberikan jasa di bawah tanggungjawab kontraktor) atau kerjasama horizontal seperti suatu joint venture (di mana dua atau lebih kontraktor sepakat untuk bersama-sama melaksanakan suatu proyek dan menanggung resiko dan hasil yang terkait dengan pelaksanaan).

Pihak lain yang juga berperan penting adalah:

- **Badan Audit**

Badan Audit (lihat Definisi 1.1.4) merupakan suatu badan yang benar-benar netral yang secara bersama-sama ditunjuk oleh Pengguna Jasa dan Kontraktor, yang aktif bekerja selama Masa Pelaksanaan untuk memantau kinerja kedua belah Pihak selama Masa Pelaksanaan. Badan ini bisa terdiri dari satu orang atau lebih yang bertugas memeriksa apakah kedua belah Pihak menjalankan Kontrak dengan semestinya selama Masa Pelaksanaan. Peran ini tidak boleh diberikan kepada Wakil Pengguna Jasa karena ia tidak memiliki independensi dan ketidakberpihakan yang dibutuhkan untuk memenuhi tugasnya sebagai Badan Audit.

Badan Audit ada untuk memantau dan mengidentifikasi kegagalan kinerja kedua belah Pihak yang mungkin terjadi, tetapi tidak dapat menginstruksikan Pihak yang melakukan kegagalan tentang bagaimana atau kapan memperbaiki kegagalan tersebut. Instruksi harus diberikan oleh Wakil Pengguna Jasa. Oleh karena itu, Badan Audit akan memberitahukan kegagalan tersebut kepada para Pihak dan Wakil Pengguna Jasa dan Wakil Pengguna Jasa akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kegagalan tersebut.

- **Dewan Penyelesaian Sengketa (Dispute Adjudication Board/DAB)**

Peran dan penunjukan DAB (lihat Definisi 1.1.27) secara detail terdapat dalam Klausula 20 [Klaim, Sengketa dan Arbitrase]. Persyaratan Umum Perjanjian Penyelesaian Sengketa mengikuti Persyaratan Umum dokumen DBO dan mengatur kewajiban umum anggota DAB kepada Pengguna Jasa dan Kontraktor, serta kewajiban umum para Pihak kepada anggota DAB. Persyaratan Umum ini tidak dimaksudkan untuk diubah, tetapi apabila ada beberapa persyaratan khusus yang diinginkan atau dirasa perlu oleh Pengguna Jasa untuk dimasukkan berkaitan dengan status atau peran DAB, hal ini harus dinyatakan secara terpisah dalam Persyaratan Khusus bagi DAB.

- **Asuransi.**

Kontrak DBO mengasumsikan bahwa semua asuransi yang disyaratkan (lihat Klausula 19 [Asuransi]) akan disediakan oleh Kontraktor. Sebelum mengefektifkan asuransi, Kontraktor diharuskan memperoleh persetujuan dari Pengguna Jasa, baik perusahaan asuransi yang akan digunakan oleh Kontraktor maupun ketentuan dan persyaratan polis yang akan dibelinya. Dalam hal ini, Pengguna Jasa harus memberikan 'persetujuan' dan bukan 'izin' dengan alasan bahwa dalam banyak kasus, asuransi harus dilakukan atas nama Kontraktor dan Pengguna Jasa, sehingga sangatlah penting bagi Pengguna Jasa untuk memeriksakan polis kepada ahli asuransi dan memastikan apakah ia terlindungi secara memadai. Umumnya, Wakil Pengguna Jasa tidak memiliki keahlian untuk memeriksa polis asuransi ini. Akan tetapi, pada saat menyetujui penyediaan asuransi yang diusulkan oleh Kontraktor, harus diingat bahwa pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan asuransi haruslah dalam mata uang yang bisa dikonversikan sehingga bisa digunakan oleh penerimanya (baik Pengguna Jasa maupun Kontraktor) untuk menutup kerugian yang dideritanya di samping itu sangat penting bagi pengguna jasa adanya “*separability*” dari perjanjian kontrak induk.

Sarwono Hardjomuljadi Dr, Ir, MSc, MSBA, MDBF, ACI Arb, ACPE
adalah Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Country Representative / Member,
Dispute Resolution Board Foundation (MDRBF)

PEMBERDAYAAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Oleh : Kimron Manik *)
Hambali **)

Seesuai Undang-undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pemerintah melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi khususnya terkait pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi. Amanat Undang-undang Jasa Konstruksi pada Pasal 11 menyebutkan bahwa tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan konstruksi harus dilandasi prinsip-prinsip keahlian dalam menjalankan profesinya. Sejalan dengan peraturan tersebut, pemerintah melakukan revitalisasi dan melakukan pembenahan secara nasional melalui pemberdayaan penanggung jawab teknik badan usaha jasa konstruksi.

Sebenarnya apa yang dimaksud dengan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha atau yang biasa disingkat dengan PJT? Berdasarkan Peraturan Menteri PU No. 04 tahun 2011 tentang pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional PJT menjadi salah satu syarat dalam mengurus Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), seseorang yang didaftarkan sebagai Penanggung Jawab Teknik Badan usaha wajib memiliki Kartu PJT. Penanggung Jawab teknik berfungsi menjamin tertib pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi.

Keputusan Menteri PU No. 45 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberdayaan Penanggung jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil mendefinisikan PJT sebagai tenaga ahli atau tenaga terampil yang mempunyai kompetensi manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada badan usaha



jasa konstruksi. Sementara Peraturan Menteri PU No. 08 tahun 2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan SubKualifikasi Usaha Jasa Konstruksi menyatakan bahwa PJT adalah tenaga ahli tetap yang ditunjuk Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) untuk bertanggung jawab atas aspek keteknikan dan operasionalisasi badan usaha jasa konstruksi. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 03 tahun 2011

menyatakan bahwa Penanggung jawab Teknik adalah tenaga ahli atau tenaga terampil yang ditunjuk PJBU untuk bertanggung jawab atas semua bidang pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan badan usaha.

Dengan melihat beberapa definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa ada tiga aspek utama yang harus dimiliki seorang Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yaitu tenaga tetap pada badan usaha,



memiliki kemampuan teknis yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian atau keterampilan, memiliki kemampuan manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan seperti administrasi keuangan, pengendalian mutu dan keselamatan kerja. Dari tiga aspek tersebut aspek ketiga yaitu kemampuan manajerial dapat dipengaruhi atau ditingkatkan melalui pemberdayaan, sedangkan dua aspek sebelumnya bersumber dari internal perusahaan dan perorangan PJT. Aspek keteknikan yang menjadi tugas utama dari seorang Penanggung Jawab Teknik tidak serta merta ditingkatkan melalui Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha karena diasumsikan telah dimiliki oleh pribadi yang bersangkutan dan upaya upgrading kemampuan dapat dilakukan

melalui pendidikan dan pemberdayaan keteknikan sesuai kebutuhan. Namun demikian perlu tidak adanya fokus pengetahuan praktis (*indepth practical knowledge*) khususnya aspek keteknikan masih terus dikaji untuk diimplementasikan dalam Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum.

Pemberdayaan Penanggung jawab Teknik Badan Usaha yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dalam hal ini Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan merupakan upaya perkuatan kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi. Perkuatan ini diawali dengan perubahan paradigma penyelenggaraan usaha konstruksi yang tadinya hanya berorientasi pada

keuntungan menjadi peningkatan daya saing. Paradigma memperoleh pekerjaan dengan berbagi jatah proyek menjadi upaya penciptaan nilai tambah, budaya pasif dan berbekal dukungan politis dan nepotisme menjadi budaya kreatif, inovatif dan berbekal IPTEK. Untuk itu pemberdayaan PJT ini menjadi bagian dalam peningkatan kompetensi, kapasitas dan kapabilitas secara berkelanjutan.

Dalam implementasinya terdapat dua jenis Pemberdayaan PJT yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum yaitu Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi Kecil dan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Bagi Badan Usaha Non-Kecil. Ilmu pengetahuan yang wajib dimiliki seorang Penanggung Jawab Teknik pekerjaan konstruksi dikategorikan sebagai pengetahuan umum dan pengetahuan khusus. Pengetahuan umum mencakup peraturan perundangan di bidang jasa konstruksi, peraturan perundangan terkait jalan, jembatan, bangunan gedung dan sumber daya air, termasuk juga pengetahuan di bidang manajemen proyek. Sedangkan pengetahuan khusus sangat tergantung kepada bidang pekerjaan yang ditangani PJT, misalnya perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi atau pengawas konstruksi.

Pada saat ini, materi yang disampaikan dalam Pemberdayaan PJT bagi Badan Usaha Kecil meliputi administrasi kontrak, persiapan proyek, pelaksanaan proyek, manajemen logistik, manajemen perusahaan, perpajakan, akuntansi, arus kas, operasionalisasi dan pemeliharaan peralatan, kesehatan lingkungan kerja, alat pelindung diri (APD) dan penerapan K3 di tempat kegiatan konstruksi. Sementara materi yang disampaikan dalam Pemberdayaan PJT Non-Kecil meliputi administrasi kontrak berdasarkan FIDIC, *Good Corporate Governance*, *quantity surveyor*, metode standar pengukuran, penerapan *information and construction (ICT)* termasuk software komputer (*dot project*), manajemen



resiko dan manajemen proyek, perencanaan dan penjadwalan proyek, manajemen rantai pasok dan Keselamatan Kerja serta alat pelindung diri. Upaya-upaya perbaikan terhadap kurikulum dan materi dalam pemberdayaan PJT terus dilakukan diantaranya dengan memperkaya pembelajaran melalui bedah kasus pengalaman empiris (*Case Based Learning*) dengan proporsi teori 40 % dan studi kasus 60 %.

Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum pada kurun waktu tahun 2004 - 2012 telah melaksanakan pemberdayaan untuk Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Kecil yang terdiri atas 6744 orang peserta tersebar di seluruh Propinsi di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Bali dan Papua. Sementara pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Non Kecil pada kurun waktu 2011 - 2012 telah memberdayakan sebanyak 961 orang peserta tersebar di beberapa propinsi di Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, Bali, Kalimantan dan Nusa Tenggara. Selain pemberdayaan PJT Kementerian Pekerjaan Umum juga melaksanakan *Training of Trainers* (ToT) bagi Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagai upaya untuk mendukung pencapaian



pemenuhan tenaga pelatih dalam pemberdayaan PJT. Dari hasil ToT tersebut pada saat ini telah tersedia lebih dari 250 orang tenaga pelatih yang telah mengikuti ToT Penanggung Jawab Badan Usaha dan tersebar di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2013 ini, sampai dengan bulan Juni, Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan telah melakukan lima kali Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha, terdiri dari satu kali Pemberdayaan PJT Kecil di Provinsi Bangka Belitung dan empat kali Pemberdayaan PJT Non kecil di Jawa

Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat dan Kalimantan Tengah. Sesuai Rencana Anggaran tahun 2013 Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan akan melakukan dua kali lagi Pemberdayaan untuk PJT Kecil di Provinsi NTT dan Papua Barat, serta tiga kali lagi Pemberdayaan untuk PJT Non Kecil di Jambi, Papua dan Kalimantan Barat.

Para peserta Pemberdayaan PJT pada umumnya memperoleh manfaat positif dari Pemberdayaan PJT yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum. Hal ini terutama dikaitkan dengan masih minimnya pembinaan yang dilakukan internal perusahaan maupun asosiasi yang berkecimpung di Bidang Jasa Konstruksi. Terkait hal tersebut Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pembinaan Konstruksi berupaya mendorong Asosiasi Badan Usaha untuk dapat menyelenggarakan kegiatan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha secara mandiri dengan berbasis CBD (*Continuous Business Development*), serta menyediakan sistem informasi (IT) untuk menyediakan bahan pemberdayaan secara *online* yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan maupun asosiasi badan usaha bahkan para Penanggung Jawab Teknik itu sendiri.



*) Kepala Bidang Pengembangan Usaha, Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Badan Pembinaan Konstruksi

**) Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi

DEMI CITA KU MERANTAU, MENGGAPAI ASA

Pelatihan Kerjasama Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU dengan
Politeknik TEDC Bandung

Dia hanya seorang anak bangsa yang baru saja meninggalkan usia remaja. Panggilan kedewasaan dirayakannya dengan mengayuh sampan harapan, meninggalkan bumi Selebes menuju Jawa Dwipa. Ia berharap ilmu dari para resi yang mumpuni dapat dibawanya kembali, membuka cakrawala baru menjemput sejahtera. Hingga dia dapat menjadi pendekar sejati yang disegani, kebanggaan bunda bapa dan negeri.

Sebait untaian kata diatas bukan sekadar kata. Adalah Laode Ramadan, seorang pemuda dari Bau-bau Sulawesi Tenggara membawa dirinya ke Bandung hendak menggali ilmu di bidang keterampilan konstruksi. Harapannya sederhana saja, tapi nyata. Membahagiakan ibu dan bapak, serta membuka lapangan pekerjaan. Laode ingin berdikari, mandiri, tidak bergantung pada orang lain.

Laode Ramadan hanya salah satu mahasiswa, diantara ratusan mahasiswa Politeknik *Technical Education Development Center* (TEDC) Bandung yang rata-rata merupakan lulusan terbaik dan berprestasi tingkat Sekolah Menengah Kejuruan dari berbagai provinsi di Indonesia. Dengan sokongan beasiswa dari berbagai instansi serta berbekal tekad, anak-anak bangsa terbaik tersebut bersemangat menuntut ilmu. Dengan harapan ilmu itu mengantarkannya kepada cita-cita.

Semangat itu yang kemudian mendorong Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Badan Pembinaan Konstruksi bekerjasama dengan Politeknik TEDC melaksanakan Pelatihan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jembatan bekerjasama dengan *Politeknik*



Technical Education Development Center (TEDC) Bandung.

Kerjasama yang baru pertama kali dilaksanakan ini, diikuti oleh 25 orang peserta yang terdiri dari 24 orang mahasiswa yang paling berprestasi di Jurusan Teknik Sipil Politeknik TEDC Bandung serta 1 orang teknisi Politeknik TEDC Bandung. Pelatihannya sendiri dilaksanakan dari tanggal 17 sampai dengan 22 Juni, dengan narasumber terpilih dari Kementerian PU.

Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi (PusbinKPK) BP Konstruksi Panani Kesai yang membuka pelatihan secara resmi, Senin (17/06) di

Kampus Politeknik TEDC Cimahi Bandung mengatakan bahwa pelatihan ini dan pelatihan-pelatihan sejenis yang telah dan akan dilaksanakan Kementerian PU sangat perlu dilakukan.

“Jika nanti AFTA yang telah di depan mata benar-benar diterapkan, akankah tenaga kerja kita siap bersaing?”, ungkap Panani Kesai. Untuk itulah Kementerian PU bekerjasama dengan segenap masyarakat jasa konstruksi harus bekerja lebih keras lagi mencetak tenaga-tenaga konstruksi yang tidak hanya berkualitas dan kompeten, tapi juga diakui.

Yang dapat menunjukkan kualitas yang diakui tersebut, tambah Panani, adalah hasil usaha yang nyata. Jika tenaga kerja Indonesia bisa bekerja setara dengan tenaga kerja asing, harusnya tenaga kerja lokal yang akan dipakai. Mengingat akan lebih murah menggunakan tenaga kerja dari lokasi proyek setempat.





Yang dikhawatirkan adalah, peningkatan anggaran yang diikuti oleh peningkatan jumlah proyek Infrastruktur hanya akan menarik pelaku asing yang kemudian dinikmati pula oleh bangsa asing. Kecenderungan yang ada selama kontraktor asing membawa serta semua sumber daya dari Negara mereka sendiri, termasuk tenaga kerja. “Jangan sampai peningkatan anggaran Infrastruktur setiap tahunnya tidak memberikan kontribusi apapun, karena tidak banyak menyerap tenaga kerja sendiri”, tutur Panani.

Untuk itulah Pelatihan semacam ini harus digarap dan diikuti secara serius. Bahan ajar pun, menurut Panani, harus lebih up to date. Seperti dalam hal jembatan, tidak hanya jembatan yang konvensional tapi juga contoh-contoh jembatan pracetak. Seperti jembatan

pracetak dalam pembuatan jalan tol terpanjang di Bali yang baru-baru telah memenuhi target dalam waktu singkat. Dan lebih penting lagi, dilakukan oleh anak bangsa Indonesia sendiri.

Direktur Politeknik TEDC Bandung, Sueb, sangat menyambut baik kerjasama ini dan berharap akan berlanjut di masa mendatang. Mengingat adanya Politeknik TEDC ini ada karena adanya pasar kerja yang membutuhkan tenaga kerja profesional. Bahkan rata-rata mahasiswa di Politeknik TEDC Bandung merupakan siswa-siswa teladan berprestasi dari berbagai provinsi di Indonesia yang kemudian mendapat beasiswa.

Yang diperlukan di kemudian hari tinggal bagaimana menempatkan mereka ke pekerjaan yang layak dan tepat. Disinilah arti pentingnya kerjasama dengan Kementerian PU yang dapat menjadi pengantar minat para mahasiswa ke jenjang berikutnya.

Dari pihak Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Barat, Daddi Ramzah, mengatakan bahwa semua pihak di industri konstruksi Indonesia harus waspada mulai dari saat ini. Menurutnya ketika ASEAN Community 2015 telah diterapkan, Indonesia akan menjadi pasar yang menarik pelaku konstruksi asing berbondong-bondong masuk didalamnya.

“Untuk investasi itu memang menguntungkan, tapi untuk tenaga kerja belum tentu”, ujar Daddi Ramzah. Sebab sebagaimana disampaikan Kepala PusbinKPK, kontraktor asing biasanya membawa tenaga kerjanya sendiri. Menjadi malapetaka jika justru tenaga kerja Indonesia tersingkir di rumahnya sendiri. Satu-satunya cara untuk bisa mengatasi 'ancaman' tersebut adalah dengan menjadi unggul dari semua sisi, baik kompetensi maupun efisiensi, dan tentunya dibantu regulasi Pemerintah. Agar pelaku asing bisa melirik tenaga kerja Indonesia minimal dari sisi efisiensi anggaran.

Selain itu kerjasama pelatihan tepat guna seperti ini, menurut Daddi, dapat menjadi percontohan Badan Sertifikasi Keterampilan (BSK) yang ada di lingkungan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi seluruh Indonesia. Mengingat ada selentingan dari beberapa pihak yang mengatakan bahwa masih beberapa keluaran dari BSK yang kemampuannya tidak sesuai dengan kenyataan yang tertulis dalam sertifikat.

Dahlan Kosasih, Kepala Jurusan Teknik Politeknik TEDC, dalam wawancara terpisah mengaku sangat senang dengan kerjasama pelatihan dengan Kementerian PU ini. Harapannya di masa mendatang kerjasama ini akan terus dilaksanakan dan dikembangkan. Pengembangan tersebut terutama untuk kerjasama pemagangan atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) di proyek konstruksi. Dahlan sangat berharap Kementerian PU dapat memfasilitasi hal ini, agar kemampuan mahasiswa dapat ter-upgrade dengan cepat.

Satu hal yang ditekankan Kepala PusbinKPK kepada peserta pelatihan, bahwa pelatihan ini dibiayai oleh negara. Yang berarti pula mereka berhutang pada rakyat. Karenanya mereka harus mengikutinya dengan sepenuh hati dan segenap kemampuan yang dimiliki. Sebab hutang itu hanya bisa dibayar dengan keberhasilan. Keberhasilan anak bangsa menggapai cita untuk membangun bangsa dan negara. (Tw)



Kunjungan Teknik dalam rangka Persiapan *Establishment of National Safety Management Center for Public Facilities* di Indonesia

Oleh : Tri Djoko Waluyo *)
Rachman Arief Dienaputra **)

Pada tanggal 10 - 14 Juni 2014, Kementerian Pekerjaan Umum diundang oleh Pemerintah Korea untuk melakukan kunjungan teknik dalam rangka persiapan pembentukan *Public Facility Safety Management Project* yang akan didanai dari Grant Pemerintah Korea melalui KoICA (*Korea International Cooperation Agency*).

Rombongan dari Kementerian PU dipimpin oleh Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi Tri Djoko Waluyo, yang didampingi oleh Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi, Kepala Balai

telah menerbitkan Undang-Undang Khusus tentang manajemen keamanan fasilitas yaitu Undang-Undang No. 10719 tanggal 24 Mei 2011 dan mulai dilaksanakan penuh pada tanggal 25 November 2011. Undang-Undang ini bertujuan untuk mencegah terjadinya bencana (*collaps*-nya infrastruktur secara tiba-tiba), meningkatkan efektifitas fasilitas dan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengecekan keamanan dan manajemen pemeliharaan fasilitas.

Jeon juga menjelaskan pelaksanaan pengawasan untuk fasilitas infrastruktur

sampai dengan E (memerlukan perbaikan segera). Dalam pelaksanaannya, yang menjadi pengawas (*Inspector*) kondisi fasilitas umum tersebut adalah pihak swasta dengan kontrol penuh dari pihak pemerintah. Sampai dengan saat ini jumlah perusahaan yang bergerak didalam pengawasan fasilitas infrastruktur terdiri dari 500 lebih perusahaan swasta.

Selain kunjungan kepada MLIT, rombongan juga melakukan kunjungan kepada *Korea Infrastructure Safety and Technology Co. (KISTEC)*. Institusi ini pada awalnya didirikan untuk mengantisipasi akibat adanya pembangunan yang cukup masif di negara Korea pada tiga dekade terakhir, dimana pembangunan saat itu lebih dititikberatkan kepada kuantitas infrastruktur, sehingga mengakibatkan terjadinya infrastruktur yang dilaksanakan secara "*low construction costs*" dan "*fast-track construction*", yang pada akhirnya infrastruktur yang dihasilkan menjadi sangat rendah dalam hal kualitas. Hal ini semakin diperparah dengan ketiadaan unit yang secara berkala melakukan inspeksi dan perbaikan terhadap infrastruktur-infrastruktur tersebut. Untuk itulah dibentuk KISTEC pada tahun 1995 yang bertujuan untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna fasilitas umum di negara Korea. Pelayanan yang diberikan oleh KISTEC dalam menunjang keselamatan Infrastruktur adalah sebagai berikut:

- In-depth inspection pada infrastruktur publik utama
- Research & Development terkait *safety inspection* pada infrastruktur publik
- Membuat *facility management system* pada tahap *design*,



Rombongan Diterima oleh oleh Mr Jeon, Byeong Kuk selaku Director General for Technology and Safety Policy (Nomor 4 dari kiri)

Teknik Lalu Lintas dan Lingkungan Jalan Badan Penelitian dan Pengembangan serta wakil dari Subdit Teknik Jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Dalam kunjungan teknik ini rombongan diterima oleh Jeon, Byeong Kuk selaku *Director General for Technology and Safety Policy, Ministry of Land, Infrastructure and Transport*. Di dalam sambutannya Jeon menyampaikan informasi bahwa Pemerintah Korea

utama yang dilakukan secara berkala 1 atau 2 kali setahun, Infrastruktur yang dianggap paling penting untuk dilakukan pengawasan secara periodik adalah jembatan, bendungan serta gedung-gedung yang merupakan fasilitas umum. Semakin banyak pengguna dari suatu fasilitas infrastruktur maka infrastruktur tersebut dianggap infrastruktur yang paling penting. Kondisi dari fasilitas tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok mulai dari A (paling baik)



Rombongan diterima Chairman KISTEC Mr Kim, Kyoung Soo

construction, supervision, maintenance and management

- Melaksanakan pelatihan bagi para *Engineer* yang akan menjadi Inspector
- Melaksanakan evaluasi terhadap hasil-hasil inspeksi yang dilaksanakan secara detail
- Melakukan *preliminary diagnosis* terkait keselamatan pada proyek rekonstruksi
- Operasi dan Pengembangan *Disasters Information Center* terkait konstruksi dan traffic.

Selain melakukan kunjungan kepada instansi, dilakukan juga kunjungan lapangan pada beberapa proyek strategis, diantaranya :

1. Busan Geoje Fixed Link

Busan-Geoje Fixed Link (*Ocean Silkroad*) merupakan salah satu milestone dalam dunia teknologi konstruksi yang patut dipelajari. Busan-Geoje Fixed Link merupakan sebuah jalur transportasi yang menghubungkan daerah Busan dengan Geoje Island dan selesai dibangun pada tahun 2010 setelah 6 (enam) tahun masa pengerjaan. Dalam pemilihan desain konstruksi untuk jalur ini digunakan dua desain yang menarik untuk diketahui:

Desain pertama adalah bangunan konstruksi terowongan bawah tanah yang menghubungkan Daejuk Island dengan Jungjuk Island dengan kedalaman sekitar 50meter dibawah muka air laut dengan panjang 3,2km. Terowongan ini tidak dibuat dengan cara mengebor tanah keras dibawah laut namun dibuat dengan sistem *immersed tube tunnel* yang lebih mampu menahan tekanan dari ombak, gempa dan lebih ramah lingkungan. Semua elemen tunnel dibuat secara pra-cetak (*precast*) di daratan. Untuk menghubungkan jalur ini dibutuhkan 18 buah elemen dengan dimensi masing-masing elemen adalah lebar 26,5m, tinggi 9,97m dan panjang 180m.

Untuk memindahkan elemen tunnel dari lokasi pencetakan ke lokasi pemasangan dilakukan dengan cara mengapungkan elemen. Sebelum proses ini bisa dilaksanakan, terlebih dahulu dikumpulkan data-data prakiraan cuaca dan gelombang. Sampai di lokasi, setiap elemen diikat dengan kawat baja untuk mengatur posisi masing-masing elemen sesuai desain untuk kemudian ditenggelamkan setelah base dari *tunnel* dipersiapkan dengan memasang *gravel bedding*. Jarak antara elemen setelah ditenggelamkan adalah sekitar 50m yang kemudian setelah itu dirapatkan dengan menggunakan *jack pressure* dan akhirnya direkatkan dengan rubber seal. Di bagian luar tunnel dilanjutkan dengan *protection works* yaitu memasang lapisan gravel dan beton untuk melindungi *tunnel* terhadap impact dari luar.

Desain kedua adalah jembatan *Cable Stayed*. Desain ini menghubungkan Jungjuk dan Jeo Islands dan digunakan juga untuk menghubungkan Geoje dan Jeo Islands. Tiang pengikat jembatan tidak didesain dalam bentuk H seperti yang selama ini dikerjakan di Korea Selatan, namun dipilih menggunakan bentuk Diamond yang lebih efisien dan optimum menahan beban. Panjang bentang jembatan *Cable Stayed* sisi Jungjuk and Jeo islands adalah



Busan Geoje Fixed Link

sepanjang 475 m sementara sisi Geoje and Jeo islands yang terdiri atas dua bentang utama dengan masing-masing sepanjang 230m. Tinggi tiang pengikat adalah 102m dengan jarak bebas di bawah jembatan adalah sekitar 36m.

Hal lain yang patut menjadi catatan adalah kesiapan dalam hal manajemen keselamatan dan bencana. Dalam hal desain tunnel, tunnel didesain dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya gempa bumi, tabrakan oleh kapal, badai topan. Pemerintah juga menyiapkan “*Emergency Observatory Centre*” dan “*Traffic System*” untuk senantiasa mengawasi setiap kemungkinan akan terjadinya “gangguan” terhadap tunnel seperti adanya “*impact*” dari luar terhadap tunnel ataupun kecelakaan lalu lintas di dalam tunnel. Tunnel juga didesain untuk mampu menahan bahaya kebakaran hingga suhu 300 celcius.

2. Yi Sun-Sin Grand Bridge

Yi Sun Sin Grand Bridge yang memiliki 4 lajur dibangun oleh DAELIM Industrial Company yang menghubungkan Kota Yeosu-si dan Kota Jollanam-do memiliki total panjang 2260 meter terdiri dari tiga span suspension bridge dengan masing-masing panjang (2x357.5 m) serta main span bridge dengan panjang 1545 m yang merupakan suspension bridge terpanjang no 4 setelah Akashi Kaikyo di Jepang dengan panjang 1.99 km, Shawman Bridge di China dengan panjang 1.65 km dan Great Belt Bridge di Denmark dengan panjang 1.62 km. Panjang 1545 m bagi jembatan ini memiliki arti khusus yaitu yaitu lahirnya Jenderal Yi Sun-Sin yang merupakan Pahlawan Legenda Korea saat berperang melawan Jepang.

Selain menjadi jembatan suspension terpanjang nomor empat di dunia, jembatan ini



Yi Sun-Sin Grand Bridge merupakan jembatan dengan span terpanjang no. 4 didunia

merupakan jembatan yang memiliki tinggi pylon tertinggi di dunia, yaitu 270 meter sedangkan jarak antara dek bawah jembatan dengan permukaan laut adalah 85 meter sehingga memungkinkan container terbesar di dunia sekalipun akan bisa melalui bawah jembatan ini secara aman.

Dari aspek keamanan operasional, jembatan ini memiliki sistem monitoring berbasis teknologi informasi dimana kondisi jembatan ini dapat termonitor secara langsung pada monitoring studio yang diawasi selama 24 jam setiap harinya.

Penutup

Bencana Tsunami Aceh, gempa di beberapa daerah dan kasus-kasus kegagalan bangunan yang terjadi akhir-akhir ini, seharusnya meningkatkan kesadaran kita mengenai pentingnya pencegahan bencana dan perubahan terhadap kebijakan manajemen keselamatan untuk fasilitas publik.

Korea Selatan dan Indonesia pada dasarnya merupakan negara yang sama-sama terletak dalam wilayah yang rawan bencana (gempa, tsunami dll), sehingga kita bisa belajar dari pengalaman Pemerintah Korea dalam melaksanakan monitoring bagi fasilitas-fasilitas umum apakah itu jembatan, DAM maupun gedung-gedung.

Kondisi perekonomian Indonesia yang sedang mengalami pertumbuhan yang cepat sehingga investasi di fasilitas publik juga meningkat. Mengingat kerawanan terhadap bencana, maka perlu perhatian khusus terhadap keamanan fasilitas publik, terutama bangunan infrastruktur berskala besar. Meniru atau mengadopsi dengan berbagai penyesuaian dari Pemerintah Korea Selatan yang telah mengembangkan “*The Legal System and Safety Inspection Techniques for Facilities Management*” dalam waktu yang cukup singkat (10 tahun) adalah suatu hal yang cukup strategis, mengingat sistem ini dikembangkan dengan efisien dan komprehensif berdasarkan pada penanganan bencana yang pernah terjadi Korea Selatan.

Perlu kiranya dipersiapkan Kebijakan baru untuk Manajemen Keselamatan bagi Fasilitas Publik di Indonesia dengan mengadopsi teknologi yang efisien/inovatif, dilengkapi dengan Panduan Inspeksi Keselamatan serta upaya penyiapan beroperasinya “*National Safety Management Center*” untuk mengelola dan memonitor pelaksanaan kebijakan baru, teknik sistem, dan prosedur bersamaan dengan pelatihan untuk pejabat pemerintah dan teknisi di lapangan adalah suatu hal yang harus diutamakan.

*) Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi

**) Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi

LAPORAN SIDANG ASEAN COORDINATING COMMITTEE ON SERVICES (CCS) KE-73

Oleh: Anita Tambing

Pendahuluan

Pertemuan ASEAN CCS ke-73 sebagai lanjutan dari rangkaian pertemuan ASEAN *Coordinating Committee on Services* diselenggarakan pada tanggal 2-13 Mei 2013 di Bandar Seri Begawan, Brunai Darussalam, bersamaan dengan empat agenda lainnya. Keempatnya adalah *ASEAN Coordinating Committee on Investment (CCI)*, *ASEAN Coordinating Committee on ATIGA*, *ASEAN Trade In Goods Arrangement (CCA)*, dan *Senior Economic Official Meeting (SEOM) 2/44*.

Delegasi Indonesia dalam pertemuan ASEAN CCS dipimpin oleh Direktur Perundingan Perdagangan Jasa (DPPJ) Kementerian Perdagangan, dengan perwakilan dari Kementerian / Lembaga terkait pembina sektor / subsektor sebagai peserta perundingan. Tim Kementerian PU terdiri dari perwakilan Badan Pembinaan Konstruksi dan Indonesia *Monitoring Committee (IMC)*, meliputi Anita Tambing (Pusbin SDI), Heti Ratnasari (Pusbin SDI), Ati Zubir (Pusbin KPK), Yanuar Munlait (Pusbin KPK), Bambang Soemardiono (Wakil Ketua IMC on Architectural), Tateng K Djajasudarma (Anggota IMC on Architectural), serta Krisna Nur Miradi (Anggota IMC on Engineering). Tim ini turut menghadiri beberapa perundingan yaitu *ASEAN Architect Education Committee (AAEC)*, *ASEAN Architect Council (AAC)*, *ASEAN Chartered Professional Engineering Coordinating Committee (ACPECC)*, *Business Services Sectoral Working Group (BSSWG)* dan *CCS Caucus*.

Hasil Sidang

Pada hari pertama Rapat ASEAN *Architect Education Committee (AAEC)*, Indonesia berkesempatan mempresentasikan Proses Akreditasi yang berlaku bagi profesional Indonesia, termasuk profesional arsitektur, yang dikeluarkan Badan Akreditasi Nasional (BAN). Indonesia juga menyampaikan ketidaksetujuan dibentuknya ASEAN *Architectural Accreditation Body* yang telah didiskusikan pada rapat AAEC kedua. Atas dasar masukan tersebut, kemudian disepakati nama agenda “ASEAN *Architectural Accreditation Body*” berubah menjadi “*Architecture Accreditation Procedures in ASEAN Member States*”.

Para peserta rapat sepakat untuk memiliki data yang baik dan akurat perihal perguruan tinggi pendidikan

arsitek yang diakui PRA (*Professional Regulatory Authority*) di Indonesia adalah LPJKN termasuk link-address serta keberadaan profesional arsitek terkini. Selain itu, Sekretariat AAC menginformasikan bahwa perihal pendidikan Arsitektur dapat diunduh dari situs www.arcasia.org.

Pada hari kedua Rapat AAC ke-16, Sekretariat AAC menginformasikan pengeluaran per-April 2013 sebesar THB 1.078.900 atau sekitar USD 36.380 untuk aktivitas dan operasional. Rapat ini mencatat 10 negara AMS (*ASEAN Member State*) telah resmi berpartisipasi dalam *MRA on Architectural Services* dengan diterimanya *Notification Letter* dari Brunai pada tanggal 17 Januari 2013 yang lalu. Selain itu, 9 (sembilan) negara telah membentuk *National Monitoring*



Committee, dan 8 (delapan) negara telah membuat *Assessment Statement*. Dalam rapat ini juga diterima pertambahan 25 nama aplikasi AA yang terdiri dari 12 nama dari Indonesia, satu nama dari Malaysia dan 12 nama dari Singapura. Sehingga total jumlah professional AA per Mei 2013 ini adalah 115 nama dengan perincian: 45 AA Indonesia, 31 AA Malaysia, dan 39 AA Singapura.

Pada rapat ini AMS diminta mempersiapkan informasi latar belakang dan struktur *Continuing Professional Development (CPD)*, serta *Registered Foreign Architecture (RFA)* yang dilaksanakan di masing-masing negara, untuk didiskusikan pada pertemuan mendatang. Kemudian Malaysia menyampaikan *Code of Professional Conduct* untuk praktisi Arsitektur Malaysia, sementara Singapura menginformasikan seluruh dokumen/informasi praktisi arsitektur Singapura dapat dilihat melalui www.boa.gov.sg termasuk *code of conduct* dimaksud.

Perihal Ke-Sekretariat-an AAC, Indonesia menyampaikan belum dapat menjadi 'host' di tahun 2013. Sedangkan Philipina mengindikasikan

bahwa akan menginformasikan kesiapan Pemerintah Philipina menjadi 'host' dalam jangka waktu 1 bulan yang akan datang. Dengan demikian maka Indonesia akan menjadi "host" pada tahun 2014, atau setelah 2-3 pertemuan AAC yang akan datang. Di akhir masa jabatan sebagai Sekretariat dan Chair AAC, Thailand akan mempublikasikan booklet dgn judul "*Local Collaboration Framework*" pada akhir Mei 2013.

Paralel dengan pelaksanaan rapat AAC ke-16, hari ke-2, Rapat ACPECC ke-20 mencatat bahwa 10 (sepuluh) negara AMS resmi berpartisipasi dalam *MRA on Engineering*, 10 (sepuluh) negara telah membentuk NMC dan 8 (delapan) negara telah membuat *Assessment Statement*. Rapat juga menerima aplikasi ACPEs baru 33 nama yaitu 7 nama dari Malaysia, 24 nama dari Myanmar, 2 nama dari Singapura. Sehingga per-rapat ini total ACPEs terdaftar 575, terdiri dari 99 nama Indonesia, 170 nama Malaysia, 24 nama Myanmar, 198 nama Singapura dan 84 nama Vietnam.

Sementara itu pada hari ketiga, Rapat BSSWG menerima dan dapat mengubah kebijakan yang dilakukan dalam 4 rapat MRA yang meliputi *Architecture*

Services, Engineering Services, Accountancy dan *Land Surveying Services*. Indonesia mengklarifikasi perihal "expert group" yang akan dibentuk oleh ACPECC dan mengingatkan bahwa terminology / "expert group" tersebut merupakan tim diskusi yang dibentuk oleh SWG sebagai wadah pembahasan kesetaraan tenaga professional AMS sampai terbentuknya MRA, sehingga lebih baik nama tim dimaksud diubah. Atas usulan ini, Myanmar menyarankan *expert group* diubah menjadi "study group". Dalam pertemuan ini Indonesia, Lao, dan Thailand juga menginformasikan kunjungan WTI (*World Trade Institute*) pada 1-2 bulan yang lalu untuk rekonfirmasi data dalam rangka penyusunan "*Handbook on Core Competencies and Domestic Regulations in the Engineering, Architecture, Accountancy and Surveying Services*", bantuan teknis yang diberikan AUSAID pada ASEAN. Tahap selanjutnya, Laporan-Rapat yang sudah diadopsi dalam Rapat SWG, termasuk BSSWG, dilaporkan kepada Pimpinan/Leaders dan didiskusikan melalui ASEAN CCS Caucus.

Dalam Rapat ASEAN CCS Caucus, Brunai mempertanyakan keberadaan 'study group' dalam laporan rapat ACPECC. Terhadap isu ini, Pimpinan Sidang (*Madam Chair*) dan ASec (ASEAN Sekretariat) menjelaskan bahwa sudah menjadi kesepakatan bersama antar AMS bahwa tidak ada pembiayaan untuk pembentukan suatu group/ tim yang baru. Sedangkan Filipina menyampaikan kesediaan untuk menjadi Pimpinan dan Sekretariat AAC pada periode selanjutnya (2013 - 2015) setelah Thailand yang akan berakhir pada Juli 2013. Dengan demikian, Indonesia akan menjadi host pada periode berikutnya 2015 - 2017.

Sementara itu, *ASEAN Agreement on Movement of Natural Person (MNP)* telah di-endorse para Menteri Ekonomi pada AEM ke-9 tanggal 10 April 2013. Namun belum ada negara anggota ASEAN menyampaikan ratifikasi



perjanjian dimaksud. Di sisi lain perihal AFAS Paket 9, dua negara anggota ASEAN yaitu Singapura dan Brunai telah menyampaikan initial *offers*, sementara 8 (delapan) negara anggota lainnya, termasuk Indonesia, masih dalam tahap konsultasi domestik.

Dalam pertemuan ini didapati bahwa beberapa komitmen dalam AFAS lebih rendah daripada komitmen pada WTO. Dalam hal ini, Indonesia mendukung bahwa komitmen ASEAN tidak boleh lebih rendah dari komitmen di WTO atau minimal sama; Indonesia akan mengadakan konsultasi internal dengan kementerian/lembaga terkait pembina sektor/subsektor. Sedangkan dalam hal liberalisasi jasa untuk subsektor *1.services incidental to manufacturing, 2.agriculture, 3.fishery, 4.forestry, dan 5.mining* adalah subsektor yang ada dalam ACIA (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement*) namun hanya untuk liberalisasi di Moda-3. Pembahasan isu *Unbound** pada penyediaan jasa melalui Moda-1 secara teknis tidak dapat dilakukan. Namun demikian terdapat subsektor yang dinilai memungkinkan memenuhi komitmen *unbound**. Perihal isu *governmental services*, yaitu jasa yang merupakan kewenangan pemerintah dan tidak bertujuan komersial, Indonesia



menyampaikan 2 subsektor yang merupakan kewenangan pemerintah yaitu *Space Transport dan Wholesale Services only for Distribution on Rice*.

Adapun Sidang ASEAN CCS selanjutnya dijadwalkan sebagai berikut:

- a) Special CCS Meeting bulan Juli 2013 di Manila;
- b) CCS ke 74 tanggal 1-5 Juli 2013 di Brunai Darussalam;
- c) CCS ke 75 bulan September 2013 di Thailand;

- d) CCS ke 76 bulan November 2013 di Laos.

Penutup

Menjelang ASEAN 2015 LPJK sebagai PRA (*Professional Regulatory Authority*) perlu terlibat secara aktif forum perundingan regional ASEAN. Beberapa isu penting yang menjadi tugas dan wewenang PRA dan akan menjadi agenda pembahasan pada ASEAN CCS berikutnya tanggal 1-5 Juli 2013, meliputi:

- a) Perguruan Tinggi (PT) pendidikan arsitek yang diakui LPJK dan link address PT dimaksud;
- b) CPD (*Continuing Professional Development*);
- c) RFA (*Registered Foreign Architecture*) dan RFPE (*Registered Foreign Professional Engineering*);
- d) *Code of Professional Conduct* untuk praktisi profesional arsitek dan engineering;

Di sisi lain, Indonesia perlu mempersiapkan diri dengan baik dengan ditetapkannya Indonesia menjadi Host Pimpinan dan Sekretariat AAC periode 2015-2017. (MU)

Penulis adalah Kepala Bidang Pasar dan Daya Saing, Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi Badan Pembinaan Konstruksi



MENTERI PU BUKA SEMINAR FIDIC

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto membuka acara Seminar dengan tema “In-House Seminar FIDIC Conditions of Contract Design-Build-Operate (DBO) dan Dewan Sengketa (Dispute Adjudication Board), Kamis (13/04) di Jakarta. Disampaikan oleh Menteri PU bahwa sebenarnya Standar Persyaratan Umum Kontrak dari FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) yang memang banyak diadopsi oleh proyek-proyek konstruksi di berbagai negara, telah pula digunakan di Indonesia.

“Kita lihat saja lebih jauh penjelasan dari para pembicara, apakah memang banyak kelebihan yang diperoleh jika kita mengaplikasikannya dalam proyek-proyek konstruksi di Indonesia”, ujar Djoko Kirmanto. Sebagai informasi saat ini berbagai proyek dengan pinjaman luar negeri dan proyek dengan pendanaan dari APBN banyak menggunakan persyaratan umum

kontrak FIDIC multilateral Development Bank (MDB) Harmonised Edition 2006 yang merupakan pengembangan dari Buku merah FIDIC.

Tentunya hal tersebut menjadi kebutuhan tersendiri bagi pelaku jasa konstruksi Indonesia untuk mempelajari lebih jauh sekaligus menjajaki kemungkinan aplikasinya, disamping menyesuaikan dengan peraturan dan kondisi nyata di lapangan. Diharapkan dengan aplikasi peraturan ini kelak akan menghasilkan kualitas output hasil pembangunan fisik yang baik, yang kemudian berimbas pada outcome yaitu hasil pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh rakyat. Tak hanya itu, dengan peraturan yang lebih baik diharapkan keberlanjutan lingkungan dan bangunan menjadi lebih baik.

Selain DBO, seminar ini juga menyampaikan tentang Dewan Sengketa (Dispute Board) yaitu suatu upaya alternatif penyelesaian

sengketa dengan cara menghindari terjadinya sengketa itu sendiri. “Menghindari sengketa ini sangat sesuai dengan filosofi bangsa kita cinta yang damai, lagipula dengan demikian kita tidak perlu lagi habis waktu ke pengadilan daripada ke lapangan”, terang Djoko Kirmanto.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Hedyanto W. Husaini mengatakan bahwa selama ini pelaku jasa konstruksi Indonesia masih kurang wawasan mengenai hukum Internasional. “Padahal kan pelaku jakons Indonesia sudah banyak berkiprah di luar negeri, tentunya harus kita bekali dengan pengetahuan yang tepat”, tutur Hedyanto.

Mengenai sengketa, menurut Hedyanto sebenarnya tingkat kompromi di Indonesia lebih tinggi dibandingkan di luar negeri. Meski demikian tetap harus dipaksakan kondisi ini menjadi tambahan pengalaman bagi anak bangsa sendiri. (Tw)





PERAN *TALENT MAPPING* BAGI JENJANG KARIR

Oleh: Lina Anggraini

Setiap individu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dimana hal tersebut akan menjadi perbedaan satu sama lain. Kelebihan ini yang nantinya akan menjadi kekuatan fokus pengembangan diri individu tersebut. Itulah mengapa setiap individu harus mengetahui apa kelebihan dan kekurangan dari dirinya sendiri. Dengan memahami hal tersebut, maka diharapkan individu dapat memanfaatkan, mengembangkan, dan menggali lebih dalam bakat yang dimiliki.

Semakin cepat seseorang mengetahui kelebihan dan kekurangannya akan semakin baik. Hal ini dikarenakan individu tersebut akan semakin mudah diarahkan kepada kekuatan atau bakatnya. Terlebih untuk karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Fenomena yang terjadi pada perusahaan/organisasi saat ini adalah banyak pegawai yang ditempatkan di tempat yang tidak sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga pegawai tersebut sulit untuk melaksanakan tugas dan mengembangkan diri.

Salah satu cara yang sering digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan tiap individu adalah dengan melaksanakan *talent mapping*. Metode ini muncul di awal tahun 1990 dan terus digunakan karena semakin banyak

perusahaan/organisasi yang menyadari bahwa keberhasilan bisnis mereka ditentukan oleh bakat dan kemampuan karyawan mereka. Perusahaan/organisasi akan berfokus pada pengembangan bakat dan mengintegrasikan rencana, proses bisnis, dan pengelolaan pegawai. Sehingga pengembangan perusahaan akan beriringan dengan pengembangan pegawai di perusahaan/organisasi tersebut.

Talent Mapping adalah gambaran peta bakat yang ada didalam diri. Dalam talent mapping, setiap individu dianggap memiliki 34 bakat. 34 bakat tersebut adalah *achiever, activator, adaptability, analytical, arranger, belief, command, communication, competition, connectedness, context, consistency, deliberate, developer, discipline, empathy, fokus, futuristic, harmony, ideation, inclusiveness, individualization, input, intellection, learner, maximizer, positivity, relator, responsibility, restorative, self-assurance, significance, strategic, dan winning others over*.

Dalam *talent mapping*, akan terlihat bakat mana yang lebih dominan dari 34 bakat dari tiap individu tersebut. Jadi pada dasarnya tidak ada individu yang memiliki bakat yang sama. Sehingga ada baiknya setiap individu mampu mengembangkan kelebihanannya sesuai dengan bakat yang

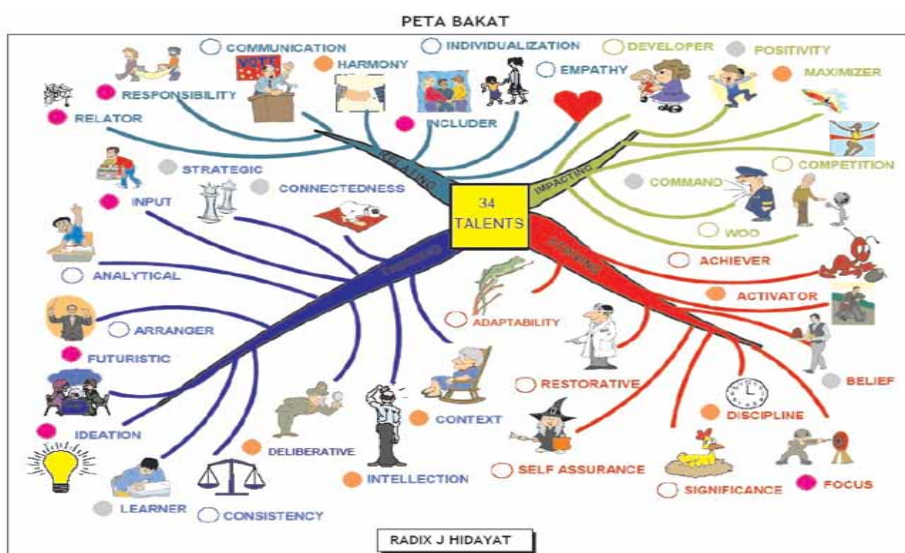
dimilikinya dan akan lebih baik jika bakat tersebut dapat dikembangkan ditempat kerja yang sesuai.

Telah banyak perusahaan/organisasi yang melakukan metode ini untuk bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pegawainya. Ada dua pendekatan yang bisa dilakukan dengan metode ini, yaitu dengan pendekatan *deficit approach* dan *strength approach*.

Pendekatan *deficit approach* merupakan pendekatan dengan mencari kelemahan seseorang dan kemudian berusaha memperbaiki kelemahannya agar menjadi kompeten, sehingga orang tersebut dapat memberikan kinerja sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hasil *talent mapping*, 10 bakat terbawah merupakan bakat yang masuk dalam *deficit approach*. Sedangkan *strength approach* adalah pendekatan yang memanfaatkan kekuatan seseorang sehingga dapat meningkatkan produktifitas dan tentunya membuat dirinya bekerja pada kapasitas maksimum. 10 bakat teratas merupakan bakat yang masuk dalam *strength approach*.

Bagian Kepegawaian, Ortala dan Hukum Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi telah melakukan pemetaan bakat melalui metode talent mapping yang dilaksanakan sejak tahun 2012 dengan jumlah 40 pegawai. Sampai saat ini, mulai dari tingkat jabatan eselon III dan IV, Bagian Kepegawaian, Ortala dan Hukum telah melaksanakan *talent mapping*. Untuk tahun 2013 ini direncanakan *talent mapping* bagi staf potensial intake D3 dan S1 sejumlah 150 orang secara bertahap setiap tahun. Tujuan dari dilaksanakannya talent mapping di Badan Pembinaan Konstruksi ini selain untuk melihat bakat dari pegawai juga bertujuan untuk menentukan jenjang karir yang sesuai dengan bakat setiap pegawai. *Talent mapping* berperan membantu perusahaan/organisasi menempatkan pegawainya di tempat yang tepat sehingga tercapai produktivitas kerja dan karir yang semakin baik bagi pegawai tersebut.

Diharapkan nantinya pegawai yang telah melaksanakan *talent mapping* dapat mengetahui pilihan pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya sehingga jenjang karir untuk pegawai tersebut dapat dibuat lebih cepat dan sesuai.



Penulis adalah Kepala Sub Bagian Ortala, Bag. Kepegawaian Ortala dan Hukum, sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi

Renungan Jelang Ramadhan

MEMPERHATIKAN DIRI PERBUATAN YANG TERLUPAKAN

Oleh : Bambang Irawan

Kita sebagai pelaku konstruksi terutama dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum selalu diwarnai dengan kesibukan kesibukan yang banyak menyita waktu. Di awal Romadhon tahun 2013 Masehi dan tahun 1434 Hijriyah, ada baiknya kita berhenti sejenak untuk mengevaluasi apa yang telah kita lakukan dan persiapan untuk menggapai masa depan yang lebih baik, hal tersebut diisyaratkan oleh Allah Swt. Dalam firmanNya surat al-Hasyr : (Qs.59 : 18)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لِنَنْظُرَ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri **memperhatikan apa yang telah diperbuatnya** untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَسُوا اللَّهَ
فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Nabipun mengajarkan kepada kita untuk bermuhasabah lewat sabdanya; *"Orang yang beruntung adalah orang yang menghisab dirinya serta beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsu serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu Wata'ala."* (HR. Turmudzi).

Terdapat beberapa hikmah yang dapat dipetik dari hadits ini. Diantara hikmah-hikmah tersebut adalah sebagai berikut :

Muhasabah dapat dilakukan dengan cara bertanya pada diri sendiri, merenungi, berkaca terhadap aib dan kekurangan. Kejujuran dan mau mengakui kesalahan adalah kunci

keberhasilan muhasabah, Apa yang diharapkan dari muhasabah tidak lain adalah Perubahan yang nyata, itulah yang menjadi tujuannya. Dari jelek menuju baik, maksiat menuju taat, lalai menjadi ingat.

Saudaraku Mari kita bermuhasabah atau introspeksi diri kita...!

Bismillahirrahmanirrahim,

Selalu sadar dan jangan lupa diri.

Manusia memiliki sifat lupa. lupa Ibadah kalau keasyikan bercanda, Lupa Ibadah kalau sedang rapat dan Lupa sholat kalau sedang sibuk bekerja. Apalagi ketika orang itu mendapat anugerah, maka ia menjadi sombong dan lupa bahwa ia pernah tidak memiliki anugerah oleh karena itu kita harus selalu sadar bahwa semua itu adalah titipan dan semua titipan akan diminta pertanggung jawaban. waspadalah, waspadalah dan waspadalah.

Didalam agama Islam kita diperintahkan/diwajibkan untuk melaksanakan Sholat sehari semalam 5 kali dan waktunya telah ditetapkan, tetapi kenyataannya kita sering mengabaikan waktu-waktu tersebut dan kita lebih mengutamakan pekerjaan Dunia, padahal lingkungan tempat kita bekerja mayoritas beragama Islam.

Kita yang mengaku umat Muslim sudah mengetahui bahwa Awal shalat ditandai dengan berkumandangnya azan, tetapi sering kita temukan, baik itu di pasar, dikantor, atau tempat-tempat lain masih saja mereka yang mengaku umat muslim sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka tidak bergegas memenuhi panggilan azan untuk shalat, bahkan ada juga dari mereka yang benar-benar meninggalkan sholat lima waktu.

Pada saat Azan berkumandang jangan dilihat siapa yang azan, tetapi harus kita sadari bahwa Azan yang berkumandang adalah panggilan dari Allah untuk kita sebagai hamba - Nya, agar kita segera menunaikan kewajiban kita kepada-Nya, yaitu shalat, coba lihat firman Allah berikut ini : Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (QS.51:56) Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. (QS. 2:21) Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan

dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. (QS. 2:22)

Shalat di awal waktu adalah amalan yang paling utama di sisi Allah. Dari Abdullah Ibnu Mas'ud, ia berkata: *"Aku bertanya kepada Rasulullah tentang amalan yang paling utama, beliau menjawab: "Shalat di awal waktunya." (HR. Imam Al Bukhari dan Muslim)*

Rasulullah SAW. telah menjelaskan bahwa shalat menghapus kesalahan. *"Bagaimana pendapatmu jika ada sungai di depan pintu rumah di antaramu, mandi di sana lima kali sehari, apakah masih ada daki di tubuhnya?" Mereka menjawab, "Tidak ada, ya Rasulallah." Sabda Nabi, "Itulah perumpamaan shalat lima waktu, Allah menghapus kesalahan dengan shalat." (Bukhari dan Muslim)*

Amal Ibadah yang dijadikan barometer oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya di akhirat, adalah shalat *"Awal hisab seorang hamba pada hari kiamat adalah shalat. Apabila shalatnya baik maka seluruh amalnya baik, dan apabila buruk maka seluruh amalnya buruk." (HR. At-Thabrani)*

Apabila kita menunda shalat, maka sama saja secara tidak langsung kita telah menyuruh Allah untuk menunggu kita, apakah Logis ini dilakukan oleh seorang hamba disaat Ia memanggil kita untuk menunaikan kewajiban kita pada-Nya? Logis kah kita menyuruh-Nya menunggu kita menyelesaikan pekerjaan atau urusan duniawi kita terlebih dahulu? Dan perlu diketahui bahwa kita masih bisa tetap berada didunia ini, juga atas ijin-Nya? Lalu mengapa masih ada dari kita yang bila Allah memanggil untuk menunaikan kewajiban kita pada-Nya, kita

sering menunda panggilan-Nya? Bahkan yang paling parah, ada dari kita yang benar-benar melalaikan kewajiban kita pada-Nya karena kesibukan dunia.

Saat azan berkumandang janganlah kita menunda sholat dengan alasan sedang sibuk dengan pekerjaan dunia, namun sebaliknya sa'at kita sibuk dengan pekerjaan dunia katakanlah kepada kesibukkan kita, "Waktu shalat telah tiba " Mari mulai detik ini kita semua mulai membiasakan diri untuk melaksanakan shalat pada waktunya. dan jangan menundanya karena kesibukan dunia, kecuali keadaan darurat seperti seorang petugas kesehatan yang sedang melakukan persalinan atau melakukan operasi.karena semua itu berhubungan dengan nyawa manusia.

Sekarang pada Bulan Romadhon ini mari kita tanyakan pada diri kita masing masing secara jujur, apakah kita sudah benar-benar mengupayakan untuk melakukan shalat diawal waktu ??? Bila belum, usahakanlah untuk melaksanakannya dengan ikhlas karena Allah. Percayalah, bila kita melakukannya dengan tulus dan ikhlas karena Allah, maka Insya Allah hal tersebut akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. *Aminyarobbal allamin*

Demikian yang dapat penulis persembahkan untuk saudaraku pembaca Buletin Badan Pembinaan Konstruksi, sehingga dimasa mendatang sholat jangan dinomor dua-kan, tetapi harus diutamakan sehingga kita semua dapat menjaga waktu waktu sholat . akhir kata penulis mohon ma'af apabila ada kekeliruan atau kesamaan kata-kata dan pada Allah Penulis mohon ampun.

Penulis adalah Kepala Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah III Banjarmasin, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Badan Pembinaan Konstruksi

**"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa ..."
(Al Qur'an Surat Al-Baqarah: 183)**



Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban,
dan sampaikanlah kami dengan bulan Ramadhan
(hadist riwayat Ahmad)

KEGIATAN DHARMA WANITA BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

Oleh: Diah Ismono

Berbagai kegiatan telah dilaksanakan di lingkungan Dharma Wanita Unit Pelaksana Badan Pembinaan Konstruksi, mencakup kegiatan di bidang pendidikan, bidang sosial budaya dan bidang ekonomi sepanjang awal, hingga pertengahan tahun 2013. Di bidang organisasi, terjadi pergantian ketua unit pelaksana Dharma Wanita Badan Pembinaan Konstruksi, karena Ibu Wita Bambang Guritno yang telah memimpin selama lebih dari tiga tahun harus mengikuti tugas Bapak Bambang Guritno ke Inspektorat Jenderal Kementerian PU. Beliau digantikan oleh Ibu Rina Hedyanto yang akan melanjutkan tongkat estafet sebagai ketua Dharma Wanita Unit Pelaksana Badan Pembinaan Konstruksi, dan serah terimanya dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2013. Selamat bertugas di tempat yang baru Ibu Wita dan selamat datang Ibu Rina Hedyanto.

Sementara itu, liputan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

Ceramah Menata Dapur

Bagi ibu rumah tangga, dapur adalah pusat kegiatan sebuah rumah dan keluarga. Dapur menjadi penting karena di ruang itulah seluruh kegiatan menyiapkan hidangan bagi keluarga diproses. Ceramah tentang merancang dan membuat dapur yang praktis, efisien, sehat, aman dan indah, sehingga kegiatan memasak dan menyiapkan makanan bagi keluarga dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan dibawa oleh Ibu Diah Ismono pada tanggal 18 Januari 2013.

Kursus Memakai Jilbab Cantik

Untuk urusan berbusana, diadakan juga kursus memakai jilbab cantik dengan pengajar Ibu Lusiana Kresnoto yang

diselenggarakan pada tanggal 22 Maret 2013. Kegiatan ini memberikan tambahan wawasan mengenai konsep berhijab bagi perempuan muslimah, sekaligus mempelajari berbagai variasi dan tips memakai jilbab. Dengan demikian para ibu dapat memakai sendiri jilbabnya tanpa harus pergi ke salon, dan tetap tampil bergaya.

Ceramah Tentang Osteoporosis

Ceramah osteoporosis yang diberikan oleh Ibu dr. Reni Gunawan pada tanggal 3 Mei 2013 adalah salah satu topik menarik, karena osteoporosis adalah masalah yang banyak dihadapi oleh perempuan, terutama mereka yang sudah memasuki masa pasca menopause. Kita layak waspada, karena ternyata penduduk Indonesia ditengarai berisiko relatif tinggi terhadap penyakit yang ditandai dengan penurunan/kehilangan masa tulang secara substansial ini dan perempuan mempunyai prevalensi lebih banyak menderita penyakit ini dibanding lelaki. Dalam ceramah ini diungkapkan bahwa akan lebih baik mencegah dengan menjaga kekuatan tulang sejak usia muda untuk mencegah terjadinya fraktur pada usia lanjut.

Serba serbi Gateball

Pada peringatan Hari Lahir Ibu Kartini, Dharma Wanita Badan Pembinaan Konstruksi berpartisipasi sebagai peserta pertandingan Gateball yang diadakan pada tanggal 23-24 April 2013. Meskipun belum membuahkan hasil juara, kebersamaan yang terbangun selama proses persiapan, latihan sampai acara pertandingan sangat berkesan. Bahkan dengan penuh semangat, latihan gateball hingga saat ini terus berlanjut dan lebih intens. Targetnya juara ya!

Penulis adalah Wakil Ketua I Dharma Wanita Persatuan Badan Pembinaan Konstruksi



Ibu Lusi Kresnoto dalam kursus memakai jilbab cantik



Ceramah Tentang Osteoporosis bersama Ibu Rina Gunawan dilanjutkan rapat koordinasi



Gateball, gateball dan gateball, tetap semangat dalam kebersamaan!



PARTISIPASI KEMENTERIAN PU PADA PAMERAN PERALATAN KONSTRUKSI INDO ICON DAN INDO BIMEX 2013

Kementerian Pekerjaan Umum berpartisipasi dan mendukung penuh Pameran Indo Icon dan Indo Bimex 2013 di JI Expo Kemayoran Jakarta. Dalam pembukaannya, Selasa (28/05), Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Hediyanto W. Husaini mengajak seluruh pelaku jasa konstruksi terutama kontraktor di Indonesia serta masyarakat umum untuk mengunjungi Pameran peralatan konstruksi ini.

“Saya mengajak dan menghimbau kontraktor kita mengunjungi pameran ini dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kemampuan pekerjaan konstruksi”, tutur Hediyanto.

Hal ini cukup beralasan, mengingat pelaku konstruksi Indonesia masih belum dapat memenuhi kebutuhan peralatan konstruksi sendiri.

Sedangkan disisi lain pekerjaan konstruksi di Indonesia sedang meningkat pesat, seiring dengan peningkatan anggaran ke-PU-an serta pelaksanaan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Sebagai gambaran, pelaksanaan MP3EI dari tahun 2011 hingga 2025 akan menghabiskan dana sekitar 400 Triliun, dimana separuhnya sendiri dialokasikan untuk proyek Infrastruktur.

Semua kondisi tersebut membutuhkan material dan peralatan dengan jumlah besar. Sedangkan di Indonesia sendiri baru tersedia sekitar 150.000 unit atau baru 71 % dari kebutuhan untuk keseluruhan proyek Infrastruktur. Disinilah perlunya supply dari produsen peralatan seperti dari Cina, sebagai pelaksana Pameran Indo Icon dan Indo Bimex ini.

“Saya kira kerjasama dengan sesama Negara Asia ada keuntungannya karena kesamaan latar belakang dan semoga juga pada kemudahan transaksi”, ujar Hediyanto. Kepala BP Konstruksi juga berharap agar kerjasama ini akan didukung oleh produsen peralatan konstruksi Cina dengan layanan purna jual, transfer teknologi, dan problem solving jika terjadi masalah di lapangan.

Di saat yang sama Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Soeharsojo mengatakan akan mendorong anggotanya untuk menggunakan kesempatan ini agar kualitas pekerjaan konstruksi semakin meningkat. “Soal kualitas produk Cina memang harus kita coba dulu, tanpa dicoba kan kita belum tahu”, kata Soeharsojo.



Sementara itu Wakil Ketua China Council for The Promotion of International Trade (CCPIT) Wang Jin Zhen mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan Negara tujuan investasi tersebar Cina di Asia. Diharapkan kerjasama ini akan terus terjalin baik di semua sektor di masa mendatang.

Pameran Indo Icon dan Indo Bimex 2013 dilaksanakan dari tanggal 28 hingga 31 Mei 2013 di Jl Expo Kemayoran Jakarta. Pameran Indo Icon merupakan pameran dan perdagangan internasional untuk peralatan konstruksi, bangunan, serta pertambangan dari Cina. Sedangkan Pameran Indo Bimex merupakan pameran dan perdagangan untuk Material dan Teknologi bangunan dari Cina. Kali ini pameran ini diikuti oleh 104 perusahaan dari delapan Provinsi di Cina. (Tw)





PROFIL BALAI PELATIHAN KONSTRUKSI WILAYAH IV MAKASSAR BERJUANG MENINGKATKAN SDM KONSTRUKSI DI SULAWESI

Secara geografis, letak pulau Sulawesi di Kawasan Timur sangatlah strategis dan merupakan salah satu sumber daya utama bagi pembangunan di wilayah Indonesia Timur. Sayangnya ketersediaan sumber daya tersebut belum didukung dengan kemampuan yang memadai dari sumber daya manusia konstruksi yang ada. Untuk itu, Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah IV berfungsi melakukan usaha peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang bekerja pada bidang usaha jasa konstruksi. Wilayah kerjanya mencakup enam propinsi, yaitu Propinsi Sulawesi Selatan, Propinsi Sulawesi Barat, Propinsi Sulawesi

Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Gorontalo dan Propinsi Sulawesi Utara. Di propinsi-propinsi tersebut, Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah IV melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis kepada para pelaku jasa konstruksi agar dapat memahami dan memecahkan problem lapangan, baik secara teknis maupun manajemen, sehingga mampu menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, bermutu, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat biaya.

Tenaga kerja konstruksi yang kompeten menjadi visi Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah IV. Adapun misi yang diemban adalah mewujudkan SDM konstruksi berkapasitas, kompeten, dan berdaya saing tinggi untuk kemandirian dan keunggulan konstruksi Indonesia dalam mewujudkan kenyamanan lingkungan terbangun (*the finest built environment*) bagi kesejahteraan, kebudayaan dan keberadaban bangsa. Didukung pendanaan dari APBN, APBD, serta Swadana peserta (Kerjasama dengan asosiasi profesi/mitra kerja), Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah IV

bermaksud meningkatkan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi di wilayah kerjanya, sehingga mampu meningkatkan produktifitas, kualitas dan memiliki daya saing di era globalisasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Toto Siswanto, selaku Kepala Balai dibantu oleh S. Adi Saputro sebagai Kasubag TU, Evaluasi dan Program, serta Mukhtar Sofyan sebagai Kasie Penyelenggara. Dengan pegawai berjumlah 26 orang yang terdiri dari 9 orang PNS dan 17 orang tenaga harian, Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah IV memiliki tupoksi melaksanakan penyusunan program pelatihan, penyelenggaraan pelatihan dan evaluasi pelatihan bidang peralatan (*heavy equipment*) dan mengembangkan kurikulum dan kerja sama pelatihan dengan unit/instansi terkait. Keterbatasan tenaga instruktur dan assesor yang dimiliki Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah IV dapat diatasi dengan bantuan tenaga widyaiswara serta praktisi yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum, Dinas PU Daerah, serta tenaga dari asosiasi





Banyak dan beragamnya jenis pelatihan yang dilaksanakan menunjukkan peran penting Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah IV dalam peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Konstruksi di Sulawesi Selatan pada khususnya dan Kawasan Timur Indonesia pada umumnya. Meski demikian, tidak adanya papan nama di depan kompleks Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah IV membuat keberadaan Balai tidak mudah terdeteksi dalam pencarian alamat dan pengenalan kepada masyarakat luas.

Ketika saya tanyakan perihal tidak adanya papan nama balai yang akan memudahkan pencarian, Marcel, seorang staf Balai menjawab “kan ini memang bukan tempat kita, mbak. Kita statusnya masih menumpang di Gedung Balai Diklat”. Hal ini dibenarkan oleh Kasubag TU, Evaluasi dan Program. “Inginnya ya punya kantor sendiri... yang namanya orang pinjem kayak gini ya kurang nyaman lah” ujar Adi Saputro. “apalagi Balai itu punya peralatan tukang dari tahun 2011 harganya sekitar 2,4 M. Sampai sekarang alatnya itu kita titip-titipkan di orang... ndak ada tempatnya” lanjut Adi. “Ya kami berharap, dan yakin, suatu saat nanti kami akan bisa memiliki kantor sendiri” tutupnya. (MU)

(instansi teknis terkait). Selain itu, Balai Pelatihan Konstruksi Wilayah IV juga dibantu oleh tenaga ahli dari BUMN, Perguruan Tinggi, dan tenaga-tenaga terlatih yang kompeten dan telah mengikuti pelatihan TOT dan asesor.

Jika di tahun-tahun sebelumnya Balai Besar Wilayah IV melaksanakan pelatihan dan uji kompetensi hingga ke kabupaten/kota, tahun ini pelatihan dan bimbingan teknis dilaksanakan di ibukota-ibukota propinsi. Pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan meliputi pelatihan untuk tenaga ahli dan pelaksana, maupun bimbingan teknis yang sifatnya Kerja Sama Operasional (KSO). Dalam semester awal tahun 2013 ini berbagai pelatihan untuk tenaga ahli yang terlaksana yaitu Pelatihan TOT Bidang Konstruksi, Pelatihan Manajer Lapangan Pekerjaan Mekanikal, Pelatihan Kepala Pengawas Pekerjaan Jalan Jembatan di Makassar. Sementara di Kendari terdapat Pelatihan Manajemen Air Minum, Pelatihan Manajemen Proyek, serta Pelatihan Manajer Lapangan Pekerjaan Jalan. Pada rentang waktu yang sama Pelatihan *Quality Assurance Engineer* serta Bimbingan Teknis Kepala Pengawas Pekerjaan Jalan dan Jembatan dilaksanakan di Manado dan Pelatihan Ahli Pengawas Konstruksi Gedung di Palu. Pelatihan dan bimbingan teknis yang berbentuk Kerja Sama Operasional (KSO) antara lain

Pelatihan Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung di Makassar, serta Bimbingan Teknis Juru Ukur di Makassar, Manado dan Gorontalo. Selain itu juga ada Bimbingan Teknis Juru Gambar Arsitektur di Makassar, Palu, Kendari, Manado, Gorontalo dan Mamuju. Sedangkan pelatihan untuk pelaksana yang dilaksanakan di antaranya Pelatihan Pelaksana Pekerjaan Jalan Beton, Bimbingan Teknis Pelaksana Lapangan Drainase Perkotaan, Bimbingan Teknis Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong, Pelatihan Mandor Perkerasan Jalan dan masih banyak lagi.



